

KEPUTUSAN TRUMP KELUAR DARI PERJANJIAN JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION TAHUN 2018

RATNA KUMALA DEWI

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail : kumalaratna14@gmail.com

ABSTRACT

This thesis will focus on the motivating factors behind the decision of Trump withdrawing from JCPOA negotiations in 2018. JCPOA is an international agreement made in the Obama era to control Iran's nuclear ambitions. But when Donald Trump was elected to be the President of the United States, Trump made a controversial policy by withdrawing from JCPOA negotiations. To analyze this case the author uses the concept of foreign policy and rational choice theory from Graham T. Allison.

In this thesis the author use qualitative method that are explanative, using secondary data. The results of this thesis indicate that a country's foreign policy changes from time to time. It's Depends on the policy maker. Trump's decision to withdraw from JCPOA is based on the consideration of the Cost and Benefit of the existence of this JCPOA agreement. In this thesis the authors found encouragement from United States allies in the Middle East (Israel and Saudi Arabia) through businessmen, organizations and lobbyists in the United States to influence Trump's foreign policy

Keywords : *Foreign Policy, JCPOA, United States, Cost-Benefit.*

PENDAHULUAN

Amerika Serikat adalah negara adidaya pemenang perang dunia kedua, sebagai negara pemenang Amerika Serikat memiliki hak untuk mengatur keamanan di dunia mengatasnamakan Dewan Keamanan. Kemenangan dalam perang membuat Amerika memiliki hak veto dalam menentukan kebijakan keamanan internasional, salah satunya pelarangan perakitan nuklir untuk senjata. (Juanita, 2015). Peristiwa perang dunia kedua yang terjadi di Kota Hiroshima dan Nagasaki yang menimbulkan ribuan korban jiwa akibat bom atom telah mendorong masyarakat dunia untuk menciptakan mekanisme penanganan senjata nuklir, energi atom penggunaannya dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Atas peristiwa ini muncullah IAEA (*International Atomic Energy Agency*)(Mikail, 2018).

Pasca Perang Dingin, yang menjadi fokus perhatian aktor internasional tidak lagi hanya terpusat pada perimbangan kekuatan antara blok Barat dan blok Timur. Isu-isu seputar hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan bebas, perdamaian di Timur Tengah, senjata pemusnah massal (*weapon mass destruction*), dan terorisme adalah isu-isu utama yang menjadi perhatian komunitas internasional. Diantara isu-isu tersebut, isu yang paling banyak menyedot perhatian publik adalah isu Timur Tengah. Hal ini di karenakan kawasan Timur Tengah tidak pernah sepi dari masalah masalah keamanan dan sarat dengan konflik. Pasca tragedi 11 September, Timur Tengah semakin menjadi pusat perhatian dunia, diantaranya akibat perang di Lebanon, munculnya kelompok-kelompok terorisme, krisis di Irak dan Suriah, konflik Israel-Palestina, serta krisis nuklir Iran(Mikail, 2018).

Proyek nuklir Iran dibangun pada tahun 1956 oleh Amerika Serikat. Pada saat itu Iran dibawah presiden Shah Pahlevi memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Pada tahun ini juga penandatanganan MoU pengembangan nuklir Iran dan Amerika Serikat. Iran adalah anggota IAEA dan penandatanganan NPT (Bâli, 2014) Namun kerja sama ini tidak berjalan lama dikarenakan lengsernya

Shah Reza Pahlevi dan terjadinya revolusi 1979 yang mana membuat hubungan diplomatic Iran dan Amerika Serikat terputus. Setelah revolusi ini sentiment terhadap Iran sangatlah besar. Iran mendapatkan banyak sanksi akibat program nuklirnya, Iran menjadi terisolasi dari dunia luar akibat sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan terhadap Program nuklirnya. Program nuklir Iran telah meresahkan dunia internasional khususnya wilayah Timur Tengah. Komunitas internasional telah lama mencari perjanjian diplomatik penting dengan Iran mengenai program nuklirnya (Rhodan, 2015).

Pada masa pemerintahan Obama Amerika Serikat mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran yaitu kesepakatan JCPOA. *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) adalah perjanjian internasional yang dibuat untuk mengontrol ambisi nuklir Iran dengan Imbalan pencabutan sanksi internasional yang diterima Iran. Dicapai oleh Iran dan P5 +1 (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) pada 14 Juli 2015 (Aljazeera, 2019). Kesepakatan ini merupakan pencapaian diplomasi terbaik yang pernah ada yang mana dapat mencairkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran.

Namun, pergantian kepemimpinan Amerika Serikat ini menimbulkan perubahan kebijakan mengenai kesepakatan JCPOA seperti yang telah dicita-citakan oleh Obama. Era kepemimpinan Trump menunjukkan komitmen yang berkebalikan dari pemerintahan Obama. Trump sangat mengecam kesepakatan tersebut dan menyatakan kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan terburuk yang pernah terjadi. Ketika Donald Trump resmi terpilih menjadi pemimpin baru di Amerika Serikat, Trump banyak membawa perubahan besar bagi negara Amerika Serikat. Banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang menghebohkan dunia yang ia buat saat kampanye pilpres Amerika. Pada awal-awal Trump menjabat sebagai presiden ia sudah banyak membatalkan kebijakan yang dibuat oleh Barack Obama (BBC, 2017). Salah satu kebijakannya yang kontroversial ialah penarikan diri dari perjanjian JCPOA tahun 2018 (Kerr, Paul K.; Katzman, 2018).

Dari penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran.

Oleh karena itu menarik untuk mengkaji lebih jauh Mengapa pemerintahan Donald Trump memutuskan menarik diri dari perjanjian JCPOA?

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Konsep Politik Luar Negeri

George Modelki, mendefinisikan politik luar negeri sebagai sistem kegiatan yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan asing harus menyoroti cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara lain. Modelski, mencatat hanya aspek-aspek kebijakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri (Bojang AS, 2018).

Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional (Mochamad, 2007). Barack Obama dan Donald Trump merupakan seseorang yang pernah menjabat dan sedang menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Presiden adalah orang yang membuat atau memutuskan sebuah politik (kebijakan) luar negeri karena presiden mempunyai wewenang sebagai treaty making power. Presiden Obama membuat kebijakan luar negeri untuk bergabung dalam keanggotaan kerja sama JCPOA sedangkan Presiden Trump membuat kebijakan luar negeri untuk keluar dari keanggotaan JCPOA tersebut.

Perbedaan kebijakan luar negeri ini tentunya dilandasi oleh perbedaan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika pada saat periode kepemimpinan tertentu. K.J.Holsti memberikan pandangan lain mengenai politik luar negeri yaitu Menurut pandangannya kebijakan luar negeri dan kajian politik internasional akan memusatkan perhatiannya pada perilaku individu dari para

pembuat kebijakan. Keputusan politik luar negeri merupakan hasil dari proses yang dilakukan seorang pembuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut, seorang decision maker dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan yang harus ia ambil sesuai dengan kepentingannya. Untuk dapat mengambil keputusan tersebut maka ia harus bertindak sebagai aktor yang rasional.

Aktor rasional yang dimaksud adalah ia membuat sebuah keputusan dengan pertimbangan keuntungan lebih banyak didapatkan daripada kerugian yang ditanggung. Trump dihadapkan pada dua pilihan yaitu pilihan untuk tetap masuk dalam negosiasi JCPOA atau menarik diri dari negosiasi tersebut. Sebagai aktor rasional, ia harus mengambil satu keputusan dari dua pilihan yang ada. Keputusan tersebut harus ia pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat ditentukan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan yang ia ambil. Donald Trump harus berfikir rasional untuk membuat keputusan akan tetap masuk dalam negosiasi JCPOA atau keluar dari negosiasi JCPOA tersebut.

2. Rational Choice Theory

Graham T Allison membuat tiga model paradigma untuk menjelaskan decision making process politik luar negeri suatu negara. Model yang pertama yaitu model aktor rasional. Model ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri yang dibuat tentunya didasari oleh pertimbangan yang rasional. Kebijakan yang akan dibuat tentunya dipertimbangkan tujuan serta dampak dari kebijakan tersebut. Menghasilkan untung banyak atau malah akan menimbulkan kerugian. Model yang kedua adalah model proses organisasi, model ini menjelaskan bahwa politik luar negeri yang dibuat itu melewati tahapan maupun prosedur kerja baku. Kebijakan yang dibuat dianggap sebagai hasil dari organisasi. Hasil ini dibuat dengan mempertimbangkan sasaran serta tujuan organisasinya. Keputusan hasil dari model ini tentunya merupakan prioritas organisasi. Model yang terakhir adalah model politik birokratik. Di dalam model ini dijelaskan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan hasil dari bargaining para stakeholder terkait.

Perumusan politik luar negeri dilakukan oleh aktor, kelompok serta kelompok kepentingan suatu Negara (Bekarekar, 2016).

Untuk menyelesaikan kasus ini peneliti menggunakan model aktor rasional. Di dalam Model actor rasional, politik luar negeri dianggap sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor yang dipandang rasional di dalam suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (Mas'ood, 1990). Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai sebuah proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh, berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada (Duncan Snidal, 2012).

Dalam teori ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (Mas'ood, 1990). Tujuan dari Donald Trump membuat kebijakan penarikan diri dari JCPOA adalah sebagai upayanya untuk menindaklanjuti janji kampanyenya. Dimana dari janji kampanye ini, Trump dapat memenangkan pemilu karena banyaknya pendukung yang tertarik terhadap isu tersebut. Di dalam kampanye dahulu trump telah mengatakan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian terburuk yang pernah ada dan trump mengatakan ingin mengakhirinya karena menurutnya perjanjian ini sangat merugikan bagi Amerika Serikat dan sekutu Timur Tengahnya. Selain itu, Trump telah berjanji kepada Perdana Menteri Israel, Netanyahu bahwa ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Dukungan Trump terhadap Israel juga dipengaruhi oleh orang kepercayaan trump yaitu menantunya yang merupakan orang kaya Yahudi (Cipto, 2018).

Sementara itu alasan rasional lain yang membuat Trump ingin mengakhiri perjanjian JCPOA ini ialah kedekatannya dengan Arab Saudi. Kedekatan Trump dengan Arab Saudi disebabkan oleh pengalamannya sebagai pengusaha internasional, yang mana Trump tau persis bahwa Amerika memiliki hutang lebih dari seratus milyar dolar Amerika pada Arab Saudi. Selain itu Trump juga merasa

negara Teluk merupakan sumber investasi yang dapat di manfaatkan Amerika untuk memperbaiki perekonomiannya. Apalagi perjanjian pembelian senjata Arab Saudi yang membuat Trump sangat pro-saudi. Bagi Trump Arab Saudi adalah lahan bisnis bagi Amerika, sehingga Amerika harus membuat kebijakan luar negeri pro-Saudi. Salah satu keputusan yang pro-Saudi dan pro-Israel ialah keputusan menarik diri dari perjanjian JCPOA dengan Iran. Bagi Arab Saudi perjanjian JCPOA yang dibuat oleh Obama ini sangatlah menguntungkan Iran. Hal ini membuat Arab Saudi maupun Israel terancam dengan eksistensinya di Timur Tengah. Perjanjian ini dianggap dapat melemahkan kekuatan Arab Saudi maupun Israel di Timur Tengah(Cipto, 2018).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif, dimana metode pengumpulan data-data yang menunjang dilakukan dengan cara kajian pustaka yaitu dengan memanfaatkan berbagai literatur seperti buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Sehingga melalui sumber-sumber tersebut dapat dijadikan acuan dalam membantu mengkaji.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian dilakukan dengan maksud untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai perbandingan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam keanggotaan JCPOA pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump, maka penulis membatasi penelitian ini dari tahun 2015 dimana tahun ini Amerika Serikat pertama kali bergabung dalam perjanjian JCPOA. Kemudian pada tahun 2018 Amerika Serikat resmi keluar dari keanggotaan JCPOA.

Pembahasan

Dalam pengambilan keputusan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, keputusannya didorong atau dipengaruhi oleh para elit-elit Amerika Serikat khususnya yang sudah membantunya semasa kampanye. Hal ini terbukti karena sebelum Presiden Trump melakukan penandatanganan terhadap perintah eksekutif untuk melakukan penarikan Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA, Israel dan Arab Saudi sudah terlebih dahulu melakukan lobi-lobi dengan pemerintahan Trump.

Pertemuan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa terdapat proses negosiasi yang dilakukan Trump terkait dengan perjanjian JCPOA. Pertemuan yang dilakukan antara Presiden Trump dengan elit Israel dan Arab Saudi tersebut adalah penindaklanjutan janji kampanye Donald Trump yaitu “America First” yang mana JCPOA salah satunya. Untuk lebih memahami bagaimana Israel dan Arab Saudi dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan Donald Trump untuk menarik diri dari perjanjian JCPOA, maka penulis akan memaparkannya dalam tiga sub bab berikut ini.

A. Menepati Janji Kampanye

Di antara 282 janji kampanyenya, menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran merupakan salah satu dari dua janji paling signifikan yang dibuat Trump untuk konstituensi sayap kanannya setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump dengan bersemangat menegaskan, Tindakannya ini mengirim pesan penting yaitu Amerika Serikat tidak lagi membuat ancaman kosong. Dengan keputusan ini Trump ingin menegaskan bahwa ia adalah pemimpin yang dapat menepati janjinya. Dia berusaha memposisikan dirinya di atas para pendahulunya yang mana hanya mampu memberikan janji tetapi tidak mampu menepati janji kampanye. Stimulus politik lain kebijakan baru Trump Iran adalah tekadnya untuk menjadi pemimpin anti-Obama. Sejak awal masa kampanyenya, terlihat kecenderungan bahwa Trump sangat anti-Obama hal ini terlihat pada politik luar negeri yang di lakukan Trump yaitu menarik diri dari Kesepakatan Nuklir dengan Iran, perjanjian iklim Paris, dan Kemitraan Trans-Pasifik(TPP) serta pemulihan hubungan dengan Kuba. Perjanjian iklim Paris dan Kemitraan Trans-Pasifik

(TPP) adalah kesepakatan penandatanganan perdagangan dan kebijakan luar negeri Obama. Namun, mereka sudah atau segera akan digerus oleh isolasionisme dan nasionalisme ekonomi Trump. Keputusannya untuk keluar dari Kesepakatan Nuklir tetap menjadi inti pelukan proteksionisme dan restriksionisme (Cherkaoui, 2018).

B. Pengaruh Israel dan Elitnya dalam penarikan perjanjian JCPOA

Max Blumenthal mengatakan bahwa Penarikan Presiden Donald Trump dari perjanjian nuklir Iran adalah hasil dari upaya melobi para miliarder Amerika Yahudi dan intelijen Israel yang digembar-gemborkan oleh Perdana Menteri Israel. Keputusan Trump untuk menarik AS keluar dari kesepakatan, yang membatasi pengayaan uranium Iran sebagai imbalan atas bantuan sanksi ekonomi, telah menuai kecaman luas dari sekutu-sekutu Eropa Washington dan Moskow, tetapi hal ini dipuji oleh Israel, karena Israel telah lama mendorong pembongkaran perjanjian ini. Trump telah dipengaruhi oleh sederetan elite pro-Israel, termasuk individu-individu kaya, organisasi lobi, penasihat kebijakan luar negeri, pejabat pemerintah, politisi kongres, dan penasihat militer yang pro terhadap Israel (RT staff, 2018).

Untuk memeriksa pengaruh elit pro-Israel pada tindakan Trump mengenai JCPOA kita dapat memeriksanya dari jejak uang. Tiga miliarder Amerika Serikat, Paul Singer, Bernard Marcus, dan Sheldon Adelson, telah disorot oleh media Amerika Serikat sebagai individu sentral dan kaya yang terlibat dalam keputusan Trump untuk menarik diri dari JCPOA. Selama pemilihan 2016, mereka menyumbang lebih dari \$ 40 juta dalam dukungan langsung untuk Trump. Selain itu, mereka juga menyumbang 44% dari sumbangan individu untuk *Congressional Leadership Fund* (CLF), 47% untuk Dana Kepemimpinan Senat (SLF), yang keduanya mendukung pemilihan para Republikan (Clifton, 2018). Untuk membuktikan peran dari miliarder ini terhadap keputusan penarikan diri dari JCPOA. Penting bagi kita untuk memeriksa preferensi politik mereka.

Paul Singer ia adalah miliarder Amerika Serikat yang mendirikan suatu kelompok konservatif yang bernama Philos Project. Tujuan dari kelompoknya ini

ialah untuk membangun oposisi terhadap JCPOA di Amerika Serikat. Selain itu, Singer berafiliasi dengan beberapa organisasi lobi konservatif dan pro-Israel, termasuk Republican Jewish Coalition (RJC), yang secara terbuka mengumumkan penentangannya terhadap keterlibatan AS dalam JCPOA(Clifton, 2015b). Dengan demikian, contoh-contoh afiliasi Singer dengan organisasi lobi pro-Israel, keduanya membuktikan bahwa jaringan Singer berekspansi ke elit pro-Israel lainnya, dan mengkonfirmasi bahwa Singer telah berinvestasi dalam memastikan penarikan Amerika Serikat dari JCPOA(Celarier, 2017).

Singer juga menyumbangkan \$ 1 juta untuk Dana pelantikan Trump, yang membuat Singer bertemu dengan Presiden pada Februari 2017(Celarier, 2017). Selain itu, ketika Trump mengumumkan penarikan JCPOA. Pada Mei 2018, Singer menyumbangkan \$ 240.000 kepada partai Republik. Beberapa minggu kemudian dia mengobrol dengan presiden selama penggalangan dana untuk kampanye pemilihan ulang Trump.Waktu sumbangan dan pertemuan ini berkorelasi dengan Singer yang terus fokus mendukung dorongan untuk menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran(Weis, 2018).

Pengaruh elit ekonomi lainnya berasal dari Adelson. Sheldon Adelson adalah seorang Yahudi, Las Vegas Casino Mogul, pendiri organisasi lobi konservatif pro-Israel, Israel-Amerika Coalition (IAC), dan anggota dewan direksi RJC. Dia adalah salah satu donor kampanye terbesar Trump di Pemilu 2016(Clifton, 2017). Adelson menyumbang lebih dari \$ 20 juta untuk PAC yang ditujukan untuk membuat Trump terpilih. Secara keseluruhan, Adelson dan istrinya menyumbangkan sekitar \$ 83 juta untuk Partai Republik selama pemilu 2016(OpenSecrets, 2016).

Selain itu, Adelson adalah penyumbang dana utama untuk kelompok anti-Iran atau sering disebut United Against Nuclear Iran (UANI), yang bekerja secara eksklusif untuk menentang proliferasi nuklir Iran dan JCPOA(Clifton, 2015). Hal ini membuktikan bahwa Adelson mengabdikan diri untuk menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam kesepakatan JCPOA. Sehari setelah pengumuman pengunduran diri JCPOA pada 9 Mei 2018, Adelson bertemu dengan Trump di Gedung Putih, dan seminggu kemudian Adelson memberikan kontribusi finansial

kepada lima kandidat kongres Partai Republik yang akan dipilih pada pertengahan 2018(Shiddiqui, 2018). Lima kandidat ini merupakan penentang ulung dari JCPOA. Selain kontribusi langsung ke lima Calon, Adelson juga setuju untuk menyumbangkan \$ 30 juta kepada CLF(Scwarz, 2018).

Bukti selanjutnya ialah Adelson dapat dihubungkan dengan beberapa penasihat kebijakan luar negeri anti-JCPOA Trump yang paling lantang. Misalnya, pada tahun 2016, Adelson menyumbang \$ 250.000 untuk tawaran Nikki Haley untuk menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB. Haley dilaporkan telah menjadi pendukung setia deklarasi Trump tentang INARA dan penarikan JCPOA. Dia bahkan disebut Trump sebagai "Iran Whisperer" oleh seorang jurnalis di majalah Politico(Johnson, 2017).

Penasihat kebijakan yang juga dihubungkan dengan Adelson adalah John Bolton. Adelson meminta Trump menggantikan penasehat keamanan nasional McMaster dengan John Bolton dikarenakan menurut Adelson, McMaster sangat tidak ramah terhadap kepentingan Israel. John Bolton sendiri sangat dikenal sebagai elang Iran. Kebencian John Bolton terhadap Iran inilah yang mendorong Adelson dan Mort Klein kepala Organisasi Zionis Amerika meminta Donald Trump agar segera menggantikan McMaster(Cutter, 2019). Dengan demikian, berdasarkan data sejauh ini, baik Singer dan Adelson berdiri sebagai individu yang kaya, yaitu anggota elit ekonomi, yang telah memastikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang pro-Israel. Dengan memberikan sumbangan dana sebagai insentif ekonomi untuk mempengaruhi Presiden dan elit politik Amerika Serikat.

Pengaruh Israel lainnya dapat dilihat pada peran Pro-Israel *Lobbyist* yaitu RJC (Republican Jewish Coalition). RJC merupakan lembaga lobbyist yang memastikan agar kebijakan luar negeri Amerika Serikat pro terhadap Israel. RJC sendiri telah menentang JCPOA selama bertahun-tahun sejak tahun 2015. Ketika Obama melibatkan Amerika Serikat dalam kesepakatan itu, direktur eksekutif RJC, Matthew Brooks, mengumumkan bahwa organisasi itu akan berdiri dengan Israel dan Perdana Menteri Netanyahu dalam menentang Iran(Clifton, 2017). Selanjutnya tahun 2016 , RJC menyumbangkan total \$ 262.250 kepada kandidat

Partai Republik. Di Senat, 14 anggota Partai Republik yang menerima bagian dari donasi, semuanya adalah pendukung untuk penarikan JCPOA. Sebenarnya, 14 kandidat Senat mewakili kelompok politisi yang beragam, namun memiliki satu pandangan yang sama yaitu dukungan mereka untuk penarikan JCPOA (Jewish Telegraphic Agency, 2018).

Peran *Lobbyist* Israel lainnya yaitu dorongan dan kekuatan dari AIPAC. Ketika meneliti kepentingan Israel di Amerika Serikat ada satu organisasi yang dominan, yaitu lobi pro-Israel terbesar di Amerika Serikat yaitu American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). AIPAC dianggap sebagai salah satu lobi pro-Israel yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. AIPAC setiap tahun menghabiskan jutaan dolar untuk upaya melobi, termasuk melobi untuk inisiatif legislatif pro-Israel khusus dan membangun hubungan antara Public Affairs Commitee pro-Israel dan kandidat politik untuk mendapatkan dukungan finansial bagi mereka(Hager, 2016).

Pada 2014, AIPAC melampaui \$ 3 juta dalam pengeluaran lobi. Pada tahun yang sama, laporan menunjukkan, AIPAC telah menghabiskan sebagian besar upayanya melobi program nuklir Iran(Mindock, 2015). Ketika AS terlibat dalam JCPOA pada 2015, AIPAC berulang kali mendesak Kongres untuk menolak kesepakatan itu, dan organisasi bahkan meluncurkan kampanye iklan senilai \$ 20-40 juta melawan JCPOA, serta bertemu dengan lebih dari 400 politisi kongres untuk meyakinkan mereka untuk menentang kesepakatan(Chang, 2015). Atas dasar ini, terbukti bahwa AIPAC secara aktif bekerja untuk memastikan pelepasan Amerika Serikat dari JCPOA. Hal ini karena adanya permintaan dari Israel yang mana menginginkan Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran. Dalam pertemuan AIPAC Benjamin Netanyahu mempresentasikan tentang bahaya nuklir Iran. Hal ini ia sampaikan berdasarkan dari hasil curian dokumen Iran yang berhasil di dapatkan oleh Intelijen Israel(Sharlin, 2018).

Namun, untuk menentukan apakah AIPAC memiliki pengaruh terhadap keputusan aktual untuk menarik Amerika Serikat dari JCPOA, penting untuk memeriksa koneksi Trump ke AIPAC mengenai masalah ini. Dalam pidatonya di konferensi AIPAC pada tahun 2016, selama kampanye pemilihan umum, Trump

secara langsung menyerang JCPOA dengan menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah untuk membongkar kesepakatan bencana dengan Iran (Begley, 2016).. Verifikasi yang ingin disampaikan Trump kepada AIPAC bahwa dia berada di halaman yang sama dengan AIPAC. Fakta bahwa pengumuman Trump di AIPAC selama pemilihan juga dapat menyiratkan bahwa ia ingin melakukannya karena ia menginginkan dukungan dari AIPAC.

Dengan demikian, ada korelasi antara tujuan AIPAC dan tindakan Trump mengenai JCPOA. Dalam hal keuntungan finansial ini sangat menarik, Trump mungkin harus mengakomodasi keinginan elit lobi Israel agar ia bisa mendapatkan keuntungan. Ketika mempertimbangkan kekuatan finansial dan pengaruh yang sangat besar, AIPAC diketahui memegang sistem politik Amerika Serikat, hal ini membuat Trump memiliki keinginan kuat untuk terus berupaya memperkuat ikatannya dengan organisasi lobi ini, bahkan setelah ia menjadi Presiden. Namun hal ini tidak lantas membuat AIPAC mendukung Trump sepenuhnya (Apitz, 2018).

C. Pengaruh Saudi dan Elitnya dalam penarikan perjanjian JCPOA

Sementara Benjamin Netanyahu dan elit Yahudinya mencoba untuk membongkar perjanjian JCPOA, sekutu Amerika Serikat lainnya yaitu Arab Saudi telah mengatur lobi dan hubungan masyarakat yang lebih tenang namun sama efektifnya untuk membongkar kesepakatan nuklir Iran. Argumen Saudi digunakan sama banyak oleh Trump dalam membenarkan keputusannya untuk menjauh dari perjanjian JCPOA. Dorongan lobi Saudi dimulai jauh sebelum Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) secara resmi diumumkan pada 14 Juli 2015. Faktanya, pelobi Saudi telah bekerja di belakang layar di Amerika Serikat selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa kepentingan Kerajaan Arab Saudi dimasukkan ke dalam kesepakatan apa pun yang akan disetujui Washington dengan Iran jika seandainya tetap akan tercapai kesepakatan. Secara total, Christian Science Monitor menemukan bahwa Arab Saudi membelanjakan \$ 11 juta dolar untuk perusahaan yang terdaftar sebagai Foreign Agents Registration Act (FARA) pada tahun 2015, dan sebagian besar pengeluaran ini berhubungan dengan Iran (Hartung & Freeman, 2018).

Foreign Agents Registration Act (FARA) yang diajukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Saudi menghabiskan hampir \$ 27 juta untuk melobi dan perusahaan hubungan masyarakat, hampir tiga kali lipat pengeluaran mereka pada tahun 2016. Menurut dokumen lobi yang diposting oleh pusat politik responsive, agen yang terdaftar atas nama kepentingan Arab Saudi sudah lebih dari 200 orang. Di antara mereka yang ada dalam daftar gaji adalah beberapa humas dan lobi di Washington: Grup McKeon, dipimpin oleh Howard P. "Buck" McKeon, mantan ketua Komite Layanan Bersenjata House; BGR Group, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Republikan terkemuka Ed Rogers dan Haley Barbour; Glover Park Group, yang diluncurkan oleh ahli strategi politik Demokrat termasuk Joe Lockhart dan Carter Eskew dan Podesta Group yang sekarang sudah tidak ada dan mantan firma superlobbyis Demokrat Tony Podesta (Bump & Moyer, 2018).

Analisis lebih lanjut atas pengajuan FARA 2017 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menghubungi anggota Kongres, administrasi Trump, media dan berbagai lembaga think tank lebih dari 2.500 kali. Dan mereka menghasilkan hampir \$ 400.000 dalam kontribusi kampanye untuk perwakilan dan senator yang mereka hubungi atas nama klien Saudi mereka (Freeman, 2018). Mereka juga mengumpulkan mantan pembuat kebijakan seperti Senator Norm Coleman, yang pengungkapan FARA-nya menyebutkan karyanya tentang "membatasi kemampuan nuklir Iran". Baru-baru ini, Coleman menulis sebuah op-ed di The Hill memuji Trump karena meninggalkan kesepakatan tanpa mengungkapkan bahwa ia dibayar oleh pemerintah Saudi. Meskipun mereka menentang keras kesepakatan apa pun dengan Iran, banyak kekhawatiran Saudi yang akhirnya ditanggapi oleh JCPOA, khususnya tuntutan mereka bahwa ketentuan "snapback" dimasukkan untuk dengan cepat memasukkan kembali sanksi jika Iran melanggar perjanjian dan bahwa pengawas memiliki akses ke situs militer dan tersangka lainnya. Di atas semua itu, Saudi menginginkan jaminan bahwa kesepakatan itu akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir (Hartung & Freeman, 2018).

Di dalam Perjanjian menyediakan ini dan Presiden Obama menjaminkannya. Obama berhasil meredam dendam Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya

dalam pertemuan Mei 2015 di Camp David di mana ia menawarkan "jaminan" bahwa kesepakatan itu tidak akan membahayakan keamanan mereka. Jaminan disini berupa janji untuk menjual senjata lebih banyak lagi kepada mereka. Tetapi dukungan Saudi untuk kesepakatan itu sangat hangat dan singkat. Sementara secara terbuka mendukungnya, Saudi dan pelobi mereka di D.C. diam-diam bekerja untuk merusaknya. Argumen mereka sebagian besar berpusat pada dua poin yaitu dana yang dibebaskan oleh kesepakatan akan mendukung dukungan berkelanjutan Iran untuk kelompok-kelompok teroris, dan kesepakatan itu tidak akan melakukan apa pun untuk menghentikan program rudal balistik Iran (Hartung & Freeman, 2018).

Sementara lebih dari dua lusin perusahaan lobi dan hubungan masyarakat DC yang bekerja untuk kepentingan Saudi telah terdaftar di bawah FARA. Banyak yang memiliki ikatan kuat dengan anggota parlemen dan kandidat presiden saat ini. Mereka berjanji untuk memberi Riyadh perubahan besar-besaran di media dan untuk menopang dukungan di DPR dan Senat untuk agenda anti-Iran. Prioritas lain adalah menjaga agar senjata AS tetap mengalir ke pasukan Saudi yang terlibat dalam perang yang berkepanjangan dan hancur di Yaman. Pada bulan Maret 2015, kedutaan Saudi di Washington dikontrak untuk membayar \$ 50.000 sebulan ke firma hukum DLA Piper untuk menjangkau anggota Kongres dan staf kongres untuk memajukan kepentingan keamanan bersama. Lobi meluas ke outlet media Amerika Serikat. Dengan menyediakan media dan wawancara untuk analis pro-Saudi, mensponsori op-ed, dan menjadi tuan rumah bantuan kongres pada jamuan makan malam mewah termasuk yang dihadiri oleh Raja Salman. Arab Saudi mencoba memperkuat pesan anti-Iran. Pelobi Saudi mendesak anggota parlemen Amerika Serikat untuk mendorong sanksi baru pada program rudal balistik Iran(Luck, 2016).

Sejak Amerika Serikat menyetujui perjanjian Iran, tidak ada yang lebih agresif mendorong poin-poin pembicaraan anti-Iran ini daripada MSLGroup. MSLGroup yang telah dibayar lebih dari \$ 6 juta dolar oleh Saudi sejak Amerika Serikat menyetujui perjanjian Iran, MSLgroup telah mendistribusikan berbagai "materi informasi" (propaganda) mengenai "Agresi Iran di Yaman," dan siaran

pers tentang Iran menjadi "sponsor negara terbesar terorisme," dan masih banyak lainnya. Dan tentu saja, MSLGroup tidak sendirian dalam menyebarkan propaganda anti-Iran atas nama rezim Saudi. Sebagai contoh, baru-baru ini pada Maret 2018, Glover Park Group mendistribusikan informasi tentang wilayah Iran, dan Hogan Lovell mendistribusikan fakta tentang Houthi dan Iran mengenai rudal balistik Iran(Hartung & Freeman, 2018).

Dengan poin-poin pembicaraan ini, orang-orang Saudi melihat peluang dalam pemilihan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan kepentingannya di Iran, dan mereka berinvestasi besar-besaran untuk merayunya. Fakta tentang kunjungan rombongan putra mahkota ke hotel Trump di New York kebetulan bocor ke Washington Post yang menghabiskan \$ 260.000 di hotel Trump di DC pada Desember 2016 selama masa transisi. Kemudian pada awal 2017 Kerajaan menghabiskan \$ 190.273(Yhlesias, n.d.). Ini merupakan salah satu upaya Arab Saudi melobi Trump. Upaya mereka terbayar dengan baik ketika Trump melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Kerajaan Arab Saudi. Hal ini dilaporkan atas saran menantunya, Jared Kushner, yang telah berteman dengan Mohammed bin Salman, putra Raja Salman(Ashford, 2018).

Pada kunjungan awal Trump, Arab Saudi mendesak Amerika Serikat agar mendukung mereka dalam pertengkaran mereka dengan Qatar (sampai ia mengetahui bahwa Amerika Serikat memiliki pangkalan militer yang agak besar di Qatar), kemudian Arab Saudi meminta dukungan militer Amerika Serikat dalam peperangan Saudi di Yaman yang telah menelan korban jiwa lebih dari 10.000 warga sipil, dan Amerika Serikat setuju untuk menjual miliaran dolar senjata kepada mereka dalam bentuk persenjataan tambahan hingga sistem pertahanan rudal yang mahal. Tetapi Arab Saudi masih menginginkan lebih yaitu mereka ingin Amerika Serikat keluar dari kesepakatan JCPOA (Hennigan, 2018).

Saat Israel mengambil pendekatan yang sangat blak-blakan untuk mempengaruhi presiden Trump dengan presentasinya, Saudi menggunakan para lobi yang dibiayai dengan baik untuk menyebarkan pesan mereka ke dalam aliran darah pemerintahan Trump. Berita-berita Propaganda utama mereka telah menemukan jalan ke telinga presiden dan menjadi salah satu alasan rutin

pembenarannya untuk meninggalkan kesepakatan JCPOA. Bukti keberhasilan Lobi Saudi dapat dilihat dalam Pernyataan Presiden Trump pada hari ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan JCPOA, Pernyataannya penuh dengan lembar fakta (Propaganda) yang dibiayai Saudi.

Salah satu kalimat Trump yaitu rezim Iran adalah sponsor utama negara terorisme, hal ini hampir sama dengan kata-kata anti-Iran yang didistribusikan oleh MSLGroup. Pernyataan Gedung Putih membenarkan meninggalkan kesepakatan Iran dipenuhi dengan poin propaganda lobi Saudi, Yaitu "JCPOA gagal untuk menangani ancaman program rudal Iran," dan Iran "terus mendanai proksi teroris di Yaman, dan rezim Iran telah meningkat konflik dengan menggunakan Houthi sebagai wakil untuk menyerang negara-negara lain (Hartung & Freeman, 2018).

Alasan rasional yang dapat penulis tangkap dari keputusan Trump ingin mengakhiri perjanjian JCPOA ini ialah Kepentingannya dengan Arab Saudi. Sebagai seorang pengusaha internasional, Trump melihat peluang keuntungan yang sangat besar dengan Arab Saudi. Sebagai aktor rasional Trump tau persis bahwa Amerika membutuhkan Arab Saudi. Kontrak senjata yang bernilai ratusan juta dolar membuat Trump yakin bahwa keputusannya ini merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan keuntungan yang mana akan membuat cita-cita Trump "Make America Great Again" tercapai. Selain itu Trump juga merasa negara Teluk merupakan sumber investasi yang dapat di manfaatkan Amerika untuk memperbaiki perekonomiannya. Apalagi perjanjian pembelian senjata Arab Saudi yang membuat Trump sangat pro-saudi. Hubungan Saudi-Amerika Serikat tidak tertandingi dalam hal penjualan senjata. Kerajaan Arab Saudi adalah pembeli senjata Amerika terbanyak daripada negara lain. Menurut laporan baru-baru ini oleh Stockholm International Peace Research Institute(Hennigan, 2018).

Arab Saudi menyumbang hampir seperlima dari jumlah ekspor senjata Amerika selama lima tahun terakhir, Bagi Trump Arab Saudi adalah lahan bisnis bagi Amerika, sehingga Amerika harus membuat kebijakan luar negeri pro-Saudi. Hal ini dikarenakan Arab Saudi menandatangani miliaran dolar kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di industri senjata dan industri

perminyakan, termasuk Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, General Electric, Exxon Mobil, Halliburton, Honeywell, McDermott International, Jacobs Engineering Group, National Oilwell Varco, Industri Nabors, Weatherford International, Schlumberger dan Dow Chemical (Reuters, 2017).

Arab Saudi Juga bergabung dengan The Blackstone Group pada Mei 2017 dengan dana \$ 40 miliar untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur di Amerika Serikat (Gara, 2017). Pada bulan ini juga Trump menandatangani perjanjian penjualan senjata dengan Arab Saudi senilai \$110 milyar. Keuntungan ekonomi inilah yang dimanfaatkan Trump sebagai peluang bisnisnya. Dengan begitu banyaknya kesepakatan ini membuat Trump tidak ingin melepaskan Arab Saudi. Salah satu keputusan yang pro-Saudi menurut Trump ialah keputusan menarik diri dari perjanjian JCPOA dengan Iran (Cipto, 2018). Karena bagi Arab Saudi perjanjian JCPOA yang dibuat oleh Obama ini sangatlah menguntungkan Iran. Dengan pencabutan sanksi terhadap Iran akan semakin memperkuat perekonomian Iran. Menurut Arab Saudi bila perekonomian Iran menguat maka Iran akan dengan mudahnya menghegemoni Timur Tengah. Hal ini membuat eksistensi Arab Saudi di Timur Tengah terancam. Perjanjian ini dianggap dapat melemahkan kekuatan Arab Saudi di Timur Tengah.

Dari penjelasan bab empat di atas, tampak bahwa Isarel dan Arab Saudi mereka mempunyai sebuah kepentingan yang ingin dicapai dan diamankan, maka mereka akan memberikan kontribusinya pada pihak yang dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Israel dan Arab Saudi akan membayar dan mencari pelobi agar dapat mempengaruhi elit politik. Para pelobi ini akan berkontribusi atau melakukan budi baik kepada calon presiden, baik secara langsung dan melalui partai dimana ia berasal dengan cara pemberian sumbangan dana ataupun dengan melakukan propaganda di media-media dan kontrak bisnis bersama. Mereka akan berkontribusi atau melakukan budi baik tersebut dimulai dari saat pencalonan presiden, para pengusaha dan pelobi tersebut akan memilih kandidat yang potensial yang dapat mewujudkan kebijakan yang akan menguntungkan mereka.

Pada saat kandidat tersebut melakukan kampanye para pengusaha dan pelobi akan menambahkan sumbangan dana pada calon presiden yang potensial untuk memastikan calon tersebut akan menang pada saat pemilihan presiden yang dilakukan pada akhir tahun 2016. Setelah kandidat potensial tersebut menang, para pengusaha dan pelobi melakukan pemantauan bagaimana progress kebijakan yang ingin mereka capai melalui lobi-lobi dengan pemerintah yang menjabat. Setelah kebijakan tersebut tercapai, para pengusaha memastikan kebijakan tersebut akan dilindungi dan disetujui di dalam kongres. Perlindungan terhadap kebijakan tersebut adalah para pengusaha tetap mengalirkan sumbangan dananya untuk partai dimana presiden tersebut berasal. Hal ini dikarenakan presiden tidak dapat sendirian dalam mengeluarkan kebijakan di dalam suatu negara, presiden juga membutuhkan persetujuan dari kongres.

Dengan demikian, para kelompok kepentingan tersebut terus memberikan dananya kepada kandidat dimana presiden tersebut berasal untuk memenangkan jumlah kursi di kongres. Kemenangan jumlah kursi di kongres dari partai presiden berasal sangat menentukan keberhasilan dari jalannya kebijakan yang menguntungkan kelompok kepentingan tersebut. Jika yang memenangkan kursi kongres adalah dari partai lawan presiden itu berasal maka dikhawatirkan kebijakan tersebut akan dicegah dan berusaha dibatalkan oleh kongres, sehingga kebijakan yang diinginkan para pengusaha tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu, penting bagi para pelobi untuk tetap memberikan sumbangan dana setelah terpilihnya kandidat presiden potensial mereka agar kebijakan dapat dilindungi di dalam kongres. Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat, para pengusaha dan pelobi tersebut terus memantau jalannya kebijakan yang mereka inginkan yaitu dengan melakukan lobi-lobi melalui pertemuan-pertemuan dengan elit politik.

Didalam dorongan berupa sumbangan dana kampanye ini Trump serta kontrak bisnis membuat Trump sebagai aktor rasional berusaha membalas budi baik dari para pengusaha dan pelobi yang telah membantunya. Bantuan ini bukan hanya karena ingin membalas budi baik saja. Namun sifat Trump yang sangat transaksionalislah yang membuat ia setuju serta memenuhi permintaan dari pada

pendukungnya. Hal ini sejalan dengan pengertian model aktor rasional yang mana lebih mengutamakan pilihan yang sekiranya mempunyai keuntungan yang jauh lebih banyak. Latar belakangnya sebagai pebisnis juga mempengaruhi sifat rasionalnya ini. Dibawah ini merupakan table keuntungan dan kerugian Trump keluar dari perjanjian JCPOA.

Tabel 1. 1 *Benefits* dan *Costs* keluar dari perjanjian JCPOA

	<i>Benefits</i>	<i>Costs</i>
Keluar dari perjanjian JCPOA	Menjaga hubungan baik dengan Israel dan Arab Saudi	Hubungan dengan Iran terputus
	Mencegah kembali menguatnya perekonomian Iran	
	Melemahkan hegemoni Iran di Timur Tengah	Memburuknya citra AS di mata pendukung JCPOA
	Mencitrakan pemimpin yang dapat menepati janji kampanyenya	
	Mencegah rudal balistik iran berkembang	
Tetap dalam perjanjian JCPOA	Menjaga citra AS yaitu menepati komitmen yang telah dibuat bersama	Adanya masa kadaluarsa pada pembatasan pengembangan nuklir Iran
		Adanya Ancaman rudal balistik yang tengah dikembangkan Iran
		Memburuknya hubungan dengan Arab Saudi dan Israel
	Hubungan baik dengan Iran tetap terjalin	Menguatnya perekonomian Iran

KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan disebabkan oleh permasalahan yang sedang dihadapi negara tersebut serta pembuat kebijakan yang sedang menjabat pada periode tersebut. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat aktor non negara yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah keputusan. Kebijakan Donald Trump menarik Amerika Serikat dari negosiasi JCPOA disebabkan Janji kampanyenya saat pemilu tahun 2016. Trump ingin dikenal sebagai pemimpin yang menepati janjinya. Sehingga Trump menarik diri dari perjanjian JCPOA. Kemudian keputusan Trump ini juga disebabkan adanya dorongan dari pengusaha dan pelobi yang mewakili Israel dan Arab Saudi. Mereka memberikan sumbangan dana terhadap Trump saat kampanye maupun setelah kampanye. Kelompok kepentingan ini juga membuat perjanjian bisnis dengan Amerika Serikat.

Sebagai seorang yang berpemikiran rasional, Trump memiliki pemikiran bahwa ketika seseorang mempunyai hutang terhadap orang lain maka ia berkewajiban untuk membayarnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Trump, pada saat kampanye pemilihan presiden ia telah dibantu berupa dana kampanye oleh pengusaha dan pelobi dari Israel dan Arab Saudi. Sebagai seorang pembuat keputusan dengan pemikiran yang rasional, Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian JCPOA. Hal ini melalui pertimbangan bahwa keuntungan yang didapatkan Amerika Serikat tidak sebanding dengan kerugian yang akan diterima Amerika Serikat. Donald Trump mempunyai pemikiran yang rasional dimana ketika seseorang mempunyai hutang terhadap orang lain maka ia berkewajiban untuk membayarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Trump, pada saat kampanye pemilihan presiden ia telah dibantu berupa dana kampanye oleh kelompok kepentingan tertentu di Amerika Serikat dan saat kepresidenannya Arab Saudi telah membantu meningkatkan perekonomian Amerika Serikat dengan adanya kontrak bisnis antara Trump dan Arab Saudi. Dengan demikian Trump berhutang pada kelompok kepentingan dan negara tersebut sehingga Trump berkewajiban membayar jasa mereka. Donald Trump tidak bisa secara langsung membayar hutang mereka secara langsung dengan mengganti uang dalam jumlah yang sama, akan tetapi dapat melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan keuntungan bagi kelompok kepentingan dan negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2019). Understanding the Iran deal: What, why and the next steps. Retrieved October 13, 2019, from Aljazeera news website: <https://www.aljazeera.com/news/2018/05/understanding-iran-deal-coming-180509072633096.html>
- Apitz, M. B. (2018). A Special Relationship? *Journal of American Studies*, 19(3), 1–78. <https://doi.org/10.1017/S0021875800015358>
- Ashford, E. (2018). A Guide to Saudi Arabia's Influence in Washington. Retrieved December 16, 2019, from Cato Institute website: <https://www.cato.org/publications/commentary/guide-saudi-arabias-influence-washington>
- Bâli, A. Ü. (2014). Negotiating Nonproliferation: International Law and Delegation in the Iranian Nuclear Crisis. *Ucla Law Review*, 232, 232–324.
- BBC. (2017). First 100 days: Where President Trump stands on key issues. Retrieved October 13, 2019, from BBC News website: <http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37468751>
- Begley, S. (2016). Read Donald Trump's Full Speech to AIPAC. Retrieved December 23, 2019, from Time website: <https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/>
- Bekarekar, W. W. S. (2016). Alasan Indonesia Dalam Melakukan kerjasama Dengan melanesian Spearhead Group (MSG). *Repository Umy*, (May), 31–48.
- Bojang AS. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6, 1–9. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330476527_The_Study_of_Foreign_Policy_in_International_Relations
- Bump, P., & Moyer, J. W. (2018). This is what Saudi Arabia's influence network in Washington looks like. Retrieved December 16, 2019, from the Washington Post website: <https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/19/this-is-what-saudi-arabias-influence-network-washington-looks-like/>
- Celarier, M. (2017). Paul Singer's Fight for the Soul of the GOP. Retrieved December 11, 2019, from Institutional Investor website: <https://www.institutionalinvestor.com/article/b15d9s2xbmkr99/paul-singers-fight-for-the-soul-of-the-gop>
- Chang, A. (2015). Lobbyists Spending Millions To Sway The Undecided On Iran Deal : It's All Politics. Retrieved December 12, 2019, from NPR website: <https://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/08/06/429911872/in-iran-deal-fight-lobbyists-are-spending-millions-to-sway-12-senators>
- Cherkaoui, M. (2018). *Reports Trump ' s Withdrawal from the Iran Nuclear Deal : Security or Economics ?* (May), 1–11.
- Cipto, B. (2018). *Politik Global Amerika dari Obama ke Trump* (N. A. Amjar, Ed.). Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.

- Clifton, E. (2015a). GOP Mega-Donor Sheldon Adelson Funds Mysterious Anti-Iran Pressure Group. Retrieved December 11, 2019, from The Nation website: <https://www.thenation.com/article/gop-megadonor-sheldon-adelson-funds-mysterious-anti-iran-pressure-group/>
- Clifton, E. (2015b). The Jewish Billionaire Behind a New Christian Anti-Iran Group. Retrieved December 11, 2019, from LobeLog website: <https://lobelog.com/the-jewish-billionaire-behind-a-new-christian-anti-iran-group/>
- Clifton, E. (2017). Trump Ignores Advisers on Iran Deal, Follows Money. Retrieved December 11, 2019, from LobeLog website: <http://lobelog.com/trump-ignores-advisers-on-iran-deal-follows-money/>
- Clifton, E. (2018). These Three Billionaires Paved Way For Trump's Iran Deal Withdrawal. Retrieved December 11, 2019, from FPIF website: <https://fpif.org/these-three-billionaires-paved-way-for-trumps-iran-deal-withdrawal/>
- Cutter, G. (2019). *THE PRO-ISRAEL LOBBY , THE UNITED STATES , AND THE IRAN NUCLEAR DEAL : THE PRO-ISRAEL LOBBY ' S INFLUENCE ON U . S .* (June).
- Duncan Snidal. (2012). Challenges to Rational Choice. *Handbook of International Relations*, 85–111. Retrieved from <http://ringmar.net/lundakurser/wp-content/uploads/2017/10/Snidal-2012-Rational-Choice-and-International-Relations.pdf>
- Gara, A. (2017). Blackstone Unveils \$40 Billion Infrastructure Mega Fund With Saudi Arabia As President Trump Visits. Retrieved December 16, 2019, from Forbes website: <https://www.forbes.com/sites/antoinegara/2017/05/20/blackstone-unveils-40-billion-infrastructure-mega-fund-with-saudi-arabia-as-trump-visits/#7432837767ad>
- Hager, L. M. (2016). The Best Congress AIPAC Can Buy. Retrieved December 11, 2019, from Foreign Policy Journal website: <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/03/22/the-best-congress-aipac-can-buy/>
- Hartung, W. D., & Freeman, B. (2018). The Saudi Lobby's Scheme to Destroy the Iran Deal. Retrieved December 15, 2019, from The American Conservative website: <https://www.theamericanconservative.com/articles/the-saudi-lobbys-scheme-to-destroy-the-iran-deal/>
- Hennigan, W. (2018). U.S.-Saudi Relationship Built on Oil, Weapons, Lobbying. Retrieved December 16, 2019, from Time website: <https://time.com/5428669/saudi-arabia-military-relationship/>
- Jewish Telegraphic Agency. (2018). Republican Jewish Coalition targets Philadelphia Democrat over his charity's donations to anti-Israel groups. Retrieved December 11, 2019, from <https://www.jta.org/2018/06/20/politics/republican-jewish-coalition-targets-philadelphia-democrat-over-his-funds-donations-to-anti-israel-groups>
- Johnson, E. (2017). Nikki Haley was Trump's Iran whisperer. Retrieved

- December 13, 2019, from Politico website:
<https://www.politico.com/story/2017/10/13/nikki-haley-trump-iran-whisperer-243772>
- Juanita, M. D. (2015). *Kepentingan Nasional Amerika Serikat Menyepakati Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) Tahun 2015*. 2015.
- Kerr, Paul K.; Katzman, K. (2018). Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit. *Congresional Research Service*, (Nuclear Agreement).
- Luck, T. (2016). To counter Iranian rival, Saudi Arabia steps up Washington lobbying. Retrieved December 15, 2019, from CSMonitor.com website:
<https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0208/To-counter-Iranian-rival-Saudi-Arabia-steps-up-Washington-lobbying>
- Mas'oed, M. (1990). *Disiplin dan Metodologi* (kedua). PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 2, No. 1, 68–83.
- Mindock, C. (2015). AIPAC Posts Biggest Lobbying Year in 2014 as Netanyahu Goes to Congress. Retrieved December 11, 2019, from OpenSecrets News website:
<https://www.opensecrets.org/news/2015/03/aipac-posts-biggest-lobbying-year-in-2014-as-netanyahu-goes-to-congress/>
- Mochamad, yanyan yani. (2007). Politik Luar Negeri. *Http://Pustaka.Unpad.Ac.Id/*, 1–13.
- OpenSecrets. (2016). Future45 Contributors, 2016 cycle. Retrieved December 11, 2019, from
<https://www.opensecrets.org/pacs/pacgave2.php?cycle=2016&cmte=C00574533>
- Reuters. (2017). Factbox: Deals signed by U.S. companies in Saudi Arabia. Retrieved December 16, 2019, from <https://www.reuters.com/article/us-saudi-usa-trump-deals-factbox/factbox-deals-signed-by-u-s-companies-in-saudi-arabia-idUSKCN18G0JY>
- Rhodan, M. (2015). Iran Nuclear Deal Reached Between U.S. and Western Powers. Retrieved November 23, 2019, from Time website:
<https://time.com/3956880/iran-nuclear-deal/>
- RT staff. (2018). “Israel lobby calling the shots in Trump’s rollback policy on Iran” – Max Blumenthal. Retrieved from RT website:
<https://www.rt.com/usa/426213-iran-deal-withdrawal-israeli-lobby/>
- Scwarz, B. (2018). Adelson backs 5 candidates in midterm races who opposed Iran deal. Retrieved December 12, 2019, from
<https://www.cnn.com/2018/06/25/adelson-backs-candidates-who-oppose-iran-deal-a-week-after-withdrawal.html>
- Sharlin, B. (2018). Netanyahu denounces Iran nuclear deal in AIPAC speech. Retrieved December 14, 2019, from NBCNews website:
<https://www.nbcnews.com/politics/white-house/netanyahu-denounces-iran-nuclear-deal-aipac-speech-n854046>
- Shiddiqui, S. (2018). Donald Trump says US will no longer abide by Iran deal – as it happened | World news. Retrieved December 12, 2019, from The

Guardian

website:

<https://www.theguardian.com/world/live/2018/may/08/iran-nuclear-deal-donald-trump-latest-live-updates?page=with:block-5af1ef7ee4b0123ab0021a15#block-5af1ef7ee4b0123ab0021a15>

- Weis, P. (2018). 'New Yorker' profile of Paul Singer plays down Israel and can't say, 'neoconservative.' Retrieved December 11, 2019, from Mondoweiss website: <https://mondoweiss.net/2018/08/yorker-profile-neoconservative/>
- Yhlesias, M. (n.d.). Donald Trump and Saudi money, explained. Retrieved December 16, 2019, from Vox news website: <https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/9/17/20868358/donald-trump-saudi-money>